

**PENGARUH PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS TERHADAP KINERJA
PETUGAS JEMBATAN TIMBANG SINGOSARI**
**THE INFLUENCE OF INTEGRITY TREATY EXECUTION TOWARDS OFFICER
PERFORMANCE OF THE WEIGHTBRIDGE AT SINGOSARI AREA**

Priyambodo¹⁾ dan Dani Djati Koentjoro²⁾

¹⁾Balitbang Provinsi Jawa Timur, Jl. Gayung Kebonsari No. 56 Surabaya

²⁾Pengawasan & Pengendalian Jembatan Timbang Singosari Jl. Raya Losari No. 3 Km. 77 Singosari – Malang

¹⁾[email: pridenantes@yahoo.co.id](mailto:pridenantes@yahoo.co.id)

²⁾[email: danidjati1@gmail.com](mailto:danidjati1@gmail.com)

Diterima: 7 Maret 2014, Revisi 1: 21 Maret 2014, Revisi 2: 31 Maret 2014, Disetujui: 9 April 2014

ABSTRAK

Keberadaan jembatan timbang diidentikan dengan praktek – praktek pungli atas barang yang di muat ketika diketahui bahwa muatannya melebihi batas daya angkut. Fenomena ini di Jawa Timur mulai ditepis dengan diterapkannya Pakta Integritas di lingkungan petugas jembatan timbang di seluruh Provinsi Jawa timur termasuk Jembatan Timbang Singosari-Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja petugas Jembatan Timbang Singosari sebelum dan sesudah diterbitkannya kebijakan Pakta Integritas antara KPK dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan untuk mengetahui seberapa efektifkah pengaruh Pakta Integritas terhadap pelanggaran praktek-praktek pungli di lingkungan Jembatan Timbang Singosari. Dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pakta Integritas tidak berpengaruh secara langsung terhadap pemilik kendaraan, pemilik barang, dan sopir angkutan barang. Pakta Integritas berpengaruh secara signifikan kepada para petugas jembatan timbang dari semua tingkatan. Karena jembatan timbang telah menerapkan sistem computerized dimana kegiatan di seluruh jembatan timbang di Jawa Timur bisa dikontrol secara terpusat di Kantor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur. Sehingga kinerja para petugas jembatan timbang pun bisa dikontrol dan meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin takutnya petugas jembatan timbang menerima uang sogokan dari para sopir serta terpenuhinya target PAD.

Kata kunci: Pakta Integritas, jembatan timbang, sopir, pemilik barang, pemilik kendaraan

ABSTRACT

The existence of the weightbridge always connected with the illegal collection. This phenomenon in East Java Province are being countered by establishing the integrity treaty to the all of East Java Province Government officer of the weightbridge, including the officer at Singosari – Malang. This research aim to know the performance of the officer of weightbridge at Singosari before and after issued the integrity treaty policy between the Corruption Eradication Commission and Government East Java Province, and also to know as much as effective the integrity treaty influence to the illegal collection violation at the weightbridge at Singosari – Malang. By using phenomenon qualitative descriptive analysis the result showed that integrity treaty not influence directly to vehicle owner, goods owner, and driver of goods transport. The integrity treaty have influenced directly to the all of officer of the weightbridge at Singosari – Malang significantly. But by computerized system applied to all the weightbridge in east Java Province so the performance of officer of the weightbridge can be controlled. It was showed by increasing the officer of the weightbridge at Singosari – Malang refused bribery from the driver.

Keywords: *the integrity treaty, weightbridge, driver, goods owner, vehicle owner*

PENDAHULUAN

Fungsi dari Jembatan Timbang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan adalah memastikan sebuah kendaraan beserta muatannya yang melewati jalur atau lintasan tertentu tidak melebihi ketentuannya, yaitu bahwa jumlah muatan yang diangkut oleh sebuah kendaraan dengan kriteria tertentu tidak boleh melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau plat sampling.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan, pasal 14 sampai pasal 19 terkait dengan kelebihan muatan akan dikenakan sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang dan/atau pemilik barang yang mengangkut barang dengan kelebihan muatan 5% sampai dengan 25% dari jumlah berat yang diizinkan (JBI) berupa denda dengan besaran sesuai dengan kategori yang ditetapkan.

Lebih lanjut bahwa pengendalian kelebihan muatan angkutan barang di maksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang di angkut dan mobil barang. Sementara tujuan pengendalian muatan angkutan jalan adalah untuk; ketertiban, kelancaran, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan; keselamatan operasional angkutan barang dan pengguna jalan lain; dan pengamanan jalan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa keberadaan Jembatan Timbang entah itu dimana lokasinya selalu di kaitkan dengan praktek - praktek pungli atau "mel-melan" atas barang yang di muat ketika diketahui bahwa muatannya melebihi batas daya angkut sesuai dengan buku ujinya dengan memberi ulang dalam jumlah tertentu. Terkait dengan stigma negatif seperti di atas, maka di buatlah kebijakan Pakta Integritas pada bulan Maret dan Juli tahun 2014 dilingkungan petugas Jembatan Timbang di seluruh Jawa Timur, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa

suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada sesama karyawan dan pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila kami melanggar hal-hal tersebut di atas kami siap menghadapi konsekuensinya .

Pakta Integritas tersebut diterbitkan atau dibuat dengan maksud untuk meluruskan peran dan fungsi Jembatan Timbang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012. Selain untuk menghilangkan dan menepis praktek-praktek pungli di lingkungan Jembatan Timbang di wilayah Provinsi Jawa Timur yang selama ini disinyalir marak terjadi dimana-mana.

Pakta Integritas tersebut berlaku untuk seluruh personil yang bertugas di Jembatan Timbang yang ada di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Termasuk Jembatan Timbang di bawah UPT LLAJ Malang yaitu Jembatan Timbang Singosari. Dengan adanya Pakta Integritas tersebut apakah ada perubahan atas kinerja di Jembatan Timbang Singosari. Sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengaruh dilaksanakannya Pakta Integritas (berisi 7 butir) terhadap kinerja petugas di Jembatan Timbang Singosari - Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pakta Integritas merupakan salah satu alat (*tool*) yang dikembangkan *Transparency International*. Tujuannya adalah menyediakan sarana bagi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Masyarakat untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah (*public contracting*). Konsep, prinsip dan metode Pakta Integritas ini telah dikembangkan di berbagai negara

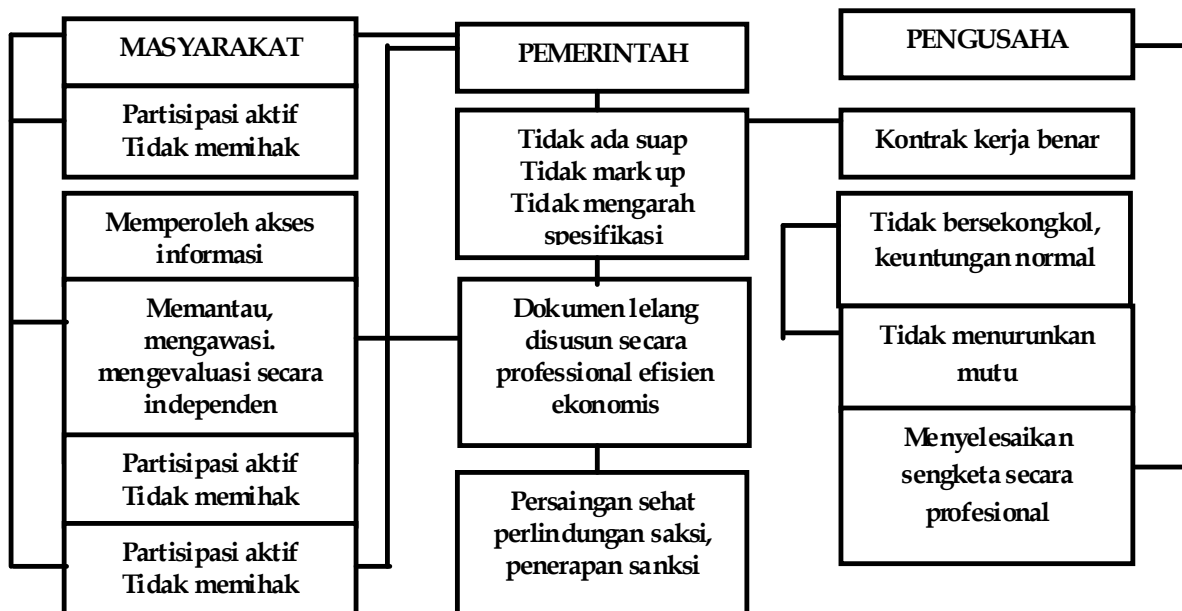
dengan penyesuaian dan modifikasi seperlunya. Hasilnya diakui oleh berbagai lembaga dunia seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, dapat mempersempit peluang korupsi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam kontrak-kontrak pemerintah, seperti pengadaan barang dan jasa (*public procurement*), privatisasi, lelang bagi lisensi maupun konsesi dan sebagainya (<http://freezcha.wordpress.com/2011/04/14/pakta-integritas/>).

Adapun manfaat Pakta Integritas (PI) bagi institusi atau lembaga adalah :

1. Melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat dan karyawan dari tuduhan-tuduhan suap;

2. PI memungkinkan peserta lelang/kontraktor melaksanakan kontrak pengadaan yang bebas suap;
3. Membantu Institusi/ Lembaga mengurangi biaya ekonomi yang tinggi;
4. Pakta Integritas membantu meningkatkan kredibilitas Institusi;
5. Pakta Integritas membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengadaan barang/jasa instansi publik;
6. Pakta Integritas membantu pelaksanaan program yang berkualitas dengan dukungan logistik tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

Elemen-elemen penting yang terkait dalam Pakta Integritas, gambar 1.



Gambar 1. Elemen Penting dalam Pakta Integritas

Sumber: DLLAJ Provinsi Jawa Timur

Isi Pakta Integritas adalah berisi tentang Komitmen Birokrat Secara Umum, yaitu :

1. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian – baik secara langsung atau tidak langsung – berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan dia atau pekerjaan dia.

3. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi – secara langsung atau tidak langsung – berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan dia atau pekerjaan dia.
4. Pemerintah daerah akan mempublikasikan ke publik dan selalu tanggap terhadap permintaan seluruh informasi tentang administrasi pelayanan publik yang relevan, meliputi antara lain: prosedur, spesifikasi teknis, ketentuan perundang-undangan.

5. Pejabat dan pegawai tidak akan mengungkapkan informasi rahasia yang hanya akan menguntungkan sekelompok/anggota masyarakat yang menyuap.
6. Pejabat dan pegawai yang terlibat dalam proses, evaluasi, pembuatan, dan pelaksanaan pelayanan publik akan mengungkapkan "pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)" yang terkait dengan kegiatan tersebut dan aset pribadi dan keluarganya (sesuai ketentuan yang berlaku) dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan, dan untuk memecahkan masalah itu; pejabat dan pegawai tersebut meminta kepada atasan untuk dapat memberikan rekomendasi.

Sementara kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi (Moeheriono, 2009 : 60). Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolok ukur keberhasilannya. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam mengelola sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat individu. Oleh karenanya kinerja individu pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor : (1) harapan mengenai imbalan, (2) dorongan, (3) kemampuan, (4) kebutuhan dan sifat, (5) persepsi terhadap tugas, (6) imbalan internal dan eksternal, (7) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja.

Dari uraian di atas maka definisi kinerja atau *performance* dapat disimpulkan sebagai berikut : hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-

masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Pada umumnya ukuran indikator kinerja dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori berikut ini.

1. *Efektif*. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian *output* yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Indikator mengenai efektivitas ini menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu yang sudah benar;
2. *Efisien*. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan *output* dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Indikator mengenai efektivitas menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu dengan benar;
3. *Kualitas*. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen;
4. *Ketepatan waktu*. Indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu. Untuk itu perlu ditentukan kriteria yang dapat mengukur berapa lama waktu yang seharusnya diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Kriteria ini biasanya didasarkan pada harapan konsumen;
5. *Produktivitas*. Indikator ini mengukur tingkat produktivitas suatu organisasi. Dalam bentuk yang lebih ilmiah, indikator ini mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu proses dibandingkan dengan nilai yang dikonsumsi untuk biaya modal dan tenaga kerja;
6. *Keselamatan*. Indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja para pegawainya ditinjau dari aspek keselamatan.

Menurut David Devries dalam Sudarmanto (2014) menyatakan bahwa dalam melakukan pengukuran kinerja ada 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan *personality trait*, yaitu dengan mengukur : kepemimpinan, inisiatif, dan sikap;
2. Pendekatan perilaku, yaitu dengan mengukur : umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap complain pelanggan;
3. Pendekatan hasil, yaitu dengan mengukur : kemampuan produksi, kemampuan menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi/penjualan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian survai, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nazir dalam Andi Prastowo, 2011 : 175). Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisa adalah individu yaitu petugas jembatan timbang, pengguna jembatan timbang (sopir, pemilik kendaraan dan pemilik barang).

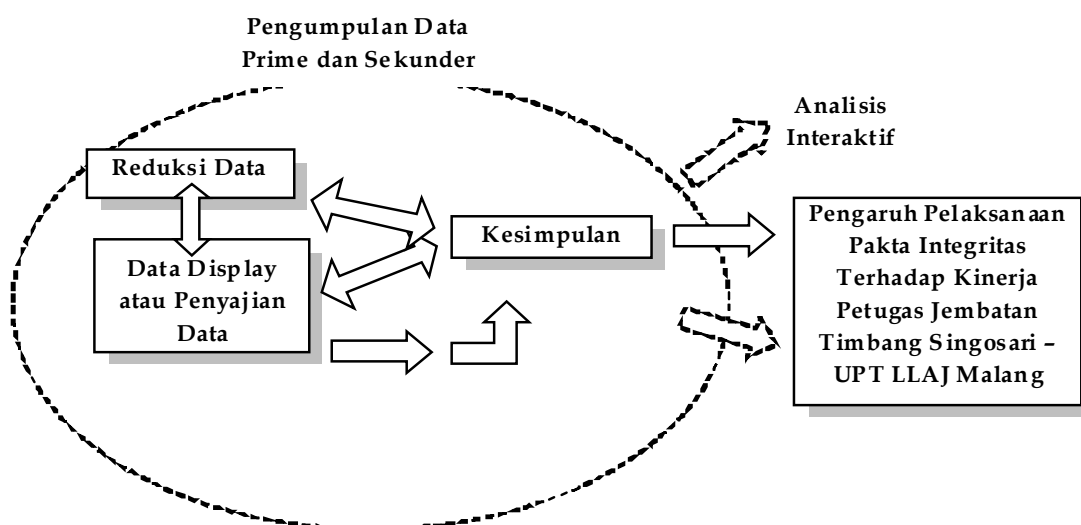
Tipe penelitian adalah deskriptif, yaitu merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta protes-protes yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dalam suatu fenomena (Whitney dalam Andi Prastowo, 2011 : 201).

Pendekatan penelitian adalah kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang lahir dan berkembang biak dari tradisi (*main stream*) ilmu-ilmu sosial yang sarat oleh pemikiran filsafat yang diwarnai idealisme, rasionalisme, humanisme, fenomenologisme, dan interpretivisme (Sanapiah Faisal dalam Burhan Bungin, 2001 : 30). Disebut sebagai pendekatan kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek-objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* (Sugiono, 2008). Dan dalam penelitian ini pendekatannya lebih ke pendekatan fenomenologis, yaitu melihat secara dekat interpretasi individu tentang pengalaman-pengalamannya. Berusaha memahami makna dari sebuah pengalaman dari perspektif partisipan (Emzir, 2010 : 22).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung (*indepth report*) dan pengamatan perilaku untuk mengetahui perilaku pengemudi angkutan barang dan juga kepada pemilik barang atau perusahaan angkutan barang dan masyarakat serta personel di Jembatan Timbang Singosari.

Sedangkan prosedur analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data primer dan sekunder yang telah terkumpul kemudian dipilah-pilah dan direduksi diambil yang pokok-pokok saja yang sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menarik, logis, faktual, dan sistematis. Proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Komponen analisis data yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan adalah merupakan rangkaian interaktif (model Miles dan Huberman) yang dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang sampai pada titik jenuh sehingga data-data yang diperoleh sudah tidak berubah lagi (sudah valid dan reliabel) dan diperoleh kesimpulan yang benar. Proses analisis interaktif model Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Proses Analisis Data dengan Istilah Berbalasan sambil Bergerak Maju
Sumber: Dimodifikasi dari Miles and Huberman dalam Sugiono 2008

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jembatan Timbang Singosari

Arus barang, jasa dan manusia masuk ke Malang Raya melalui 3 (tiga) jalur, yaitu *pertama*, dari arah utara ke selatan adalah dari Surabaya menuju Malang Raya. Pada ruas ini angkutan barang harus melewati Jembatan Timbang Singosari. *Kedua*, dari arah timur, yaitu dari Banyuwangi-Lumajang-Jember menuju Malang Raya, angkutan barang yang lewat ruas ini juga harus melewati Jembatan Timbang Singosari. Dan yang *ketiga*, adalah dari arah barat, yaitu Kediri-Blitar menuju Malang Raya angkutan barang yang lewat ruas ini tidak melewati Jembatan Timbang Singosari. Barang yang diangkut dan melewati Jembatan Timbang Singosari terdiri dari 9 (sembilan) bahan pokok dan komoditas strategis.

Sembilan bahan pokok tersebut adalah beras, gula, minyak goreng mentega, hewan ternak, susu, jagung, minyak tanah, dan garam. Komoditas strategis adalah BBM, semen, bahan bangunan, pupuk, sayur dan lain-lain. Pada tahun 2013 jumlah kendaraan yang ditimbang di Jembatan Timbang Singosari dari arah Surabaya - Malang ada sebanyak 17.876 kendaraan per bulan dengan berat muatan 88.404 ton, gambar 3.

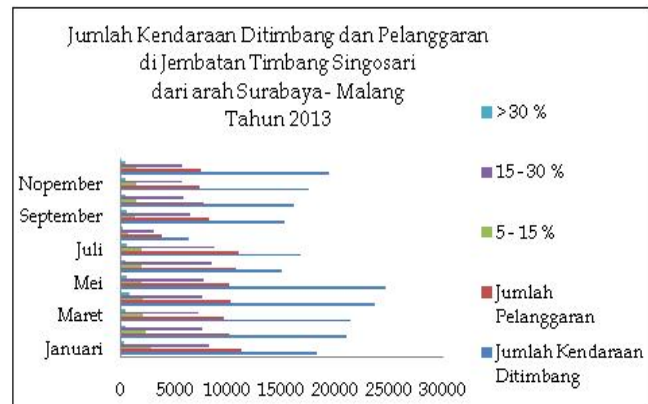


Gambar 3. Jumlah Kendaraan yang Ditimbang di Jembatan Timbang Singosari

Sumber:

Pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang periode 2013 paling banyak didominasi oleh muatan barang golongan I dengan kelebihan muatan barang sebanyak 15 % - 30 %, yaitu sebanyak 81.555 kendaraan, gambar 4.

Biaya kompensasi kelebihan muatan pada kendaraan angkutan barang yang melewati Jembatan Timbang Singosari per bulannya pada periode 2013 adalah Rp 237.132.500,- , gambar 5.



Gambar 4. Jumlah Kendaraan yang Ditimbang dan Pelanggaran di Jembatan Timbang Singosari

Sumber: DLLAJ Provinsi Jawa Timur



Gambar 5. Biaya Kompensasi di Jembatan Timbang Singosari

Sumber: DLLAJ Provinsi Jawa Timur

Jembatan Timbang Singosari terletak di Jl. Raya Losari No. 3 KM 77 Singosari. Posisinya berada di sebelah kiri dari arah timur ke barat dari Surabaya - Malang dan dari Banyuwangi - Jember - Lumajang - Malang yang berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang yang melintasinya. Jembatan Timbang Singosari memiliki nilai yang sangat strategis karena semua barang Sembilan bahan pokok dan komoditi strategis dari luar Malang yang akan masuk ke Malang Raya harus di kontrol muatannya melalui jembatan timbang ini. Rata-rata per hari ada sebanyak 596 kendaraan dan 2.947 ton barang yang harus dikontrol muatannya pada Jembatan Timbang Singosari. Seluruh barang kebutuhan pokok dan komoditi strategis tersebut akan didistribusikan ke 33 kecamatan di seluruh Kabupaten Malang, 5 Kecamatan Kota Malang, dan 3 kecamatan Kota Batu.



Gambar 6. Jembatan Timbang Singosari-UPT LLAJ Malang

B. Jembatan Timbang Singosari Setelah Penanda Tanganan Pakta Integritas

Untuk membereskan masalah pungli di 20 jembatan timbang, Dinas Perhubungan Propinsi Jatim dapat dikatakan membuat terobosan yang cukup berani dan cerdas dengan mengganti semua sistem manual dengan *full computerized*. Perubahan sistem pelayanan yang semula manual menjadi *computerized* sistem adalah salah satu upaya untuk mewujudkan zona integritas (ZI) bebas korupsi atau wilayah bebas korupsi (WBK).

Selanjutnya untuk menetralisasi praktek-praktek kotor di jembatan timbang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menerapkan zona integritas bebas korupsi dan integritas pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 20 tahun 2012. Upaya yang telah dilakukan di lingkungan Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim adalah dengan melakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai. Hal tersebut dilakukan guna mengikat komitmen para pejabat dan pegawai untuk tidak melakukan tindakan korupsi.

1. Pandangan Pemilik Kendaraan dan Pemilik Barang

Pemilik kendaraan akan berpandangan, semakin cepat kendaraannya kembali (tidak memakan waktu lama dalam mengangkut) maka hal ini dianggap menguntungkan, karena kendaraannya bisa segera disewakan lagi, dan ini berarti uang akan mengalir lagi ke kantong pemilik kendaraan.

Gunadi, lahir di Kediri pada tahun 1956 telah berbisnis angkutan sejak dua puluh tahun yang lalu. Kendaraannya biasanya memuat telur dari Pasuruan dan dikirim ke daerah Kasin, Kota Malang. Dalam seminggu tiga kali truk

berukuran sedang ini pergi-pulang dari dan ke Pasuruan – Malang mengangkut telur.

Perlu digaris bawahi bahwa jembatan timbang merupakan pusatnya (sarange) pungli diakui oleh para pengusaha angkutan barang, meskipun sang pemilik tidak mengoperasikan sendiri kendaraannya. Mereka tahu adanya pungli di jembatan timbang datang dari para sopir-sopirnya yang mengeluhkan adanya pungli di jembatan timbang. Dan juga dari berita-berita dari mass media masa baik cetak maupun elektronik. Begitu juga tentang adanya perubahan mendasar tentang adanya zona integritas (ZI) bebas korupsi dan juga Pakta Integritas yang berlaku diseluruh Jawa Timur juga sudah diketahui oleh para pengusaha angkutan di Jawa Timur.

Informasi ini diketahui dari pemberitaan di media elektronik dan media cetak juga dari sosialisasi yang dilakukan oleh jajaran Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur. Dari informasi Informan ini diketahui bahwa para pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan pada umumnya bersikap pasif atas praktek-praktek pungli yang terjadi di jalan maupun di jembatan timbang. Hal ini terjadi karena sang pemilik kendaraan tidak bersentuhan secara langsung dengan pihak-pihak yang melakukan praktek-praktek pungli. Atau karena tidak merugikan secara langsung dengan kepentingannya.

Begitu juga para pemilik kendaraan angkutan barang juga tidak pernah menyuruh atau memerintahkan kepada sopir untuk melakukan sesuatu terhadap para petugas di lapangan, misalnya menyuap dan lain sebagainya.

Menurut Lee Kian Shien atau Akian seorang pemilik galangan (bahan bangunan) yang cukup besar di Surabaya berpandangan, bahwa yang terpenting barang yang dikirim ke tempat tujuan cepat sampai di tempat tujuan dengan biaya yang seminim mungkin. Tak jarang untuk mengejar keuntungan yang besar, maka jumlah pengiriman sedapat mungkin di percepat dengan menambah volume yang diangkutnya. Dimana muatan yang seharusnya 10 ton diisi 15 ton, sehingga jika volume yang harus dikirim ada 75 ton maka dilakukan pengiriman 5 kali @ 15 ton, sehingga bisa menekan ongkos pengiriman.

Pandangan Akian ini adalah tipe seorang

pengusaha yang terlalu mengejar keuntungan semata. Prinsip-prinsip ekonomi menjadi ciri utamanya, yaitu dengan seminimal mungkin usaha berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Akian selalu berusaha mengirim barang melebihi muatan, minimal 2 ton dari jumlah yang ditentukan. Untuk menyiasatinya dia memberikan uang tambahan kepada sopir untuk diberikan kepada petugas jembatan timbang. karena menurut perhitungannya Akian masih mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara menyuap petugas jembatan timbang untuk meloloskan muatannya. Namun Akian tidak bersedia merinci lebih jauh berapa keuntungan yang dia peroleh dengan cara menyuruh sopirnya untuk menyuap petugas jembatan timbang.

Dan petugas jembatan timbang pada umumnya berdasarkan pengalamannya mau menerima

praktek-praktek seperti ini, meskipun para petugas tidak memintanya. Biasanya praktek-praktek seperti ini diinisiasi oleh para sopir, meskipun ada juga beberapa petugas jembatan timbang yang memancing-mancing terlebih dulu.

Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan zona integritas di seluh jembatan timbang termasuk Jembatan Timbang Singosari dimana telah dipasang alat control atau CCTV dan penerapan aturan yang semakin ketat atas kelebihan muatan barang yang diangkutnya, maka keuntungan Akian mulai berkurang hingga 5 %. Akian pun juga mengetahui dari sosialisasi yang diterimanya bahwa telah disepakati Pakta Integritas di jajaran petugas Jembatan Timbang di seluruh Provinsi Jawa Timur. Namun Akian akan tetap mencoba melakukan nego-nego seperti sebelumnya jika petugas bisa diajak nego, tetapi jika tidak bisa maka Akian akan menuruti aturan.

Tabel 1. Matriks Pertanyaan Setelah Adanya Pakta Integritas Untuk Pemilik Kendaraan dan Barang

No	Pertanyaan Ke Pemilik Kendaraan dan Barang	Rata-rata Jawaban
1	Bagaimana kondisi jembatan timbang saat ini ?	Menjadi pusat/sarang korupsi/pungli/suap menyuap
2	Bagaimana mengetahui praktek-praktek pungli/suap di jembatan timbang ?	Dari para sopir dan dari media masa
3	Apakah sudah mengetahui bahwa sekarang ada pakta integritas ?	Ya sudah tahu dari pemberitaan
4	Bagaimana perilaku/ pandangan pemilik kendaraan ?	Yang penting kendaraannya cepat pulang/kembali untuk beroperasi lagi
5	Bagaimana pandangan pemilik barang tentang jembatan timbang ?	Terlalu berfikir ekonomis untuk kepentingannya sendiri tanpa mempedulikan efeknya terhadap kerusakan jalan
6	Bagaimana perilaku pemilik barang ?	Masih ada yang berusaha untuk menyogok petugas demi keuntungan bisnisnya
7	Bagaimana perilaku petugas jembatan timbang ?	Masih ada yang mau menerima uang sogokan meskipun tidak pro aktif atau se agresif dahulu

Sumber: Diolah dari Data Primer, Malang 2014

2. Pandangan Sopir

Para sopir angkutan barang merupakan pihak yang berposisi lemah, mereka tidak mempunyai bargaining yang kuat. Hanya sekedar menjual tenaganya untuk mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan upah tertentu yang telah disepakatinya. Dalam kondisi seperti ini sopir biasanya hanya pasrah saja, kadang ada sisa dari upah borongannya, kadang tidak

bayaran sama sekali karena uangnya habis untuk beli BBM, makan, dan member mel-melan kepada petugas di jalan dan jembatan timbang.

Triono sebagai sopir memang tidak bisa banyak berbuat ketika berada di lapangan, baik di jalan maupun di jembatan timbang. Jika di jalan raya untuk menghindari polisi jalan raya (PJR) Triono biasanya mempunyai jalan bobolan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ongkos di jalan.

Sementara jika melewati jembatan timbang dia sudah tahu berapa rupiah harus membayar ke petugas jembatan timbang. Cara memberinya biasanya uang dilipat-lipat dalam bentuk kecil dan digenggam langsung diberikan kepada petugasnya. Atau mengikuti petugas masuk ke dalam kantor di jembatan timbang, sudah ada kesepakatan tentang besarnya dengan jumlah kelebihan tertentu pada muatan barangnya.

Tabel 2. Matrik Pertanyaan Setelah Adanya Pakta Integritas Untuk Sopir

No	Pertanyaan Ke Sopir	Rata-rata Jawaban
1	Bagaimana kondisi di jalan dan jembatan timbang pada umumnya ?	Selalu ada pungli/ mel-melan yang besarnya tidak pasti
2	Bagaimana sikap petugas ketika diberi uang sogokan ?	Rata-rata menerima
3	Apakah tahu tentang pakta integritas ?	Rata-rata tidak tahu, tetapi mengetahui kalau di jembatan timbang sekarang dipasang CCTV
4	Bagaimana kondisi jembatan timbang setelah dipasang CCTV	Ada perubahan

Sumber: Diolah dari Data Primer, Malang 2014

Wawancara dengan sopir (“... lha gimana mas,...sopir itu tinggal nurut apa kata majikannya. Disuruh ke utara ya..pergi ke utara, diberi sebarangpun oleh juragan ya.. diterima saja, yang penting masih ada sisanya. Problem di jalan dipikir nanti, memang serba repot karena di jalan pasti ada pungli. Lewat di jembatan timbang pasti keluar uang kalau ingin lancar. Jarang ada petugas yang menolak kalau diberi uang oleh sopir ...sudah sama-sama tahu...padahal saya juga tahu kalau sekarang sudah ada kameranya (maksudnya CCTV) Kalau Pakta Integritas saya tidak ngerti apa itu Pakta Integritas...yang saya tahu sekarang agak ketat ...”)

Namun menurut Triono sejak dipasang CCTV di Jembatan Timbang Singosari ada sedikit perubahan. Para petugas jembatan timbang tidak begitu ngoyo dalam bekerja dan tidak meminta sejumlah uang tertentu atas kelebihan muatan barangnya. Petugas jembatan timbang sudah lebih fokus melakukan denda kompensasi terhadap pelanggaran kelebihan muatan. Jadi kalau

muatan berlebih petugas sudah berani dan tega menolak uang sogokan yang diberikan oleh para sopir. Petugas jembatan timbang lebih memilih memproses kelebihan muatan pada kendaraan-kendaraan yang memiliki kelebihan muatan sesuai peraturan yang berlaku.



Gambar 7. Angkutan BBM dari arah Surabaya menuju Malang melakukan penimbangan di Jembatan Timbang Singosari

3. Informan Petugas Jembatan Timbang Singosari

Praktek-praktek suap-menyuap di lingkungan Jembatan Timbang Singosari memang sudah berjalan sejak dulu. Semua petugas dari strata bawah sampai pimpinan mengetahui praktek-praktek ini. Dan praktek-praktek ini juga sudah diketahui oleh masyarakat. Sistem pengawasan pada saat itu belum ketat karena semuanya masih manual belum komputerized. Pengawasan hanya dilakukan oleh pimpinan setempat dan belum ada transparansi seperti sekarang. Korupsi, suap-menyuap, pungli dan sejenisnya sudah menjadi penyakit (patologi) birokrasi saat itu.

Pimpinan jelas tahu praktek-praktek seperti ini, bahkan dia juga akan memberikan sebagian kepada pejabat yang lebih tinggi. Memang tidak secara terang-terangan dan tidak menampakkan sikap yang fulgar dengan mengatakan, ...”bagian saya mana dan berapa ?”..., sikapnya sangat hipokrit. Tidak meminta, tetapi kalau tidak dikasih akan marah dengan mengekspresikan sikap tidak ramah kepada bawahannya tersebut, atau menyindir.

Namun setelah dibuat Pakta Integritas, semuanya menjadi berubah. Petugas di Jembatan Timbang Singosari saat ini ada 20 PNS yang dipimpin oleh Kepala Seksi. Dalam menjalankan tugasnya mereka mengaturnya

dalam beberapa shift. Diantara mereka masing-masing sudah menandatangani Pakta Integritas antara staf dan pimpinan (termasuk pimpinan seksi/unit). Untuk mensukseskan pelaksanaan zona integritas (ZI) bebas korupsi pelayanan publik yang menurut Pakde Karwo menyebutnya bahwa jembatan timbang merupakan etalase publik, maka jembatan timbang harus bebas dari pungli. Untuk pelaksanaannya Pakta Integritas di Jembatan Timbang Singosari masing-masing petugas (staf dan pimpinan) mendapatkan beberapa fasilitas penunjang, seperti tambahan penghasilan dalam berbagai bentuk.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jembatan Timbang Singosari bertanggung jawab atas pengoperasian Jembatan Timbang Singosari. Dalam mengoperasikan Jembatan Timbang Singosari dibantu oleh 12 PNS, 6 orang operasional data, 2 orang *office boy*, dan 1 orang administrator.

Dengan dicanangkannya zona integritas pelayanan publik dan dilanjutkan dengan penanda tanganan Pakta Integritas antara pimpinan dan bawahan di semua tingkatan maka ada perubahan yang cukup signifikan dari perilaku petugas di jembatan timbang. fokus mereka akhirnya tertuju pada penindakan pada kendaraan yang memuat barang dengan volume yang berlebih sesuai dengan peraturan daerah tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang.

Apalagi dengan diberlakukannya Pakta Integritas dibarengi dengan kompensasi imbalan dari pemerintah dalam jumlah yang memadai dan pada umumnya para petugas jembatan timbang agak takut untuk menerima uang pelicin demi meloloskan jumlah muatan yang berlebih. Matriks Pakta Integritas terkait dengan sikap petugas Jembatan Timbang Singosari terhadap 7 butir pernyataan untuk tidak melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dapat dilihat pada tabel 3.

Matriks Pakta Integritas dalam tabel 3, menunjukkan potret pelaksanaan Pakta Integritas yang terdiri dari 7 butir pernyataan yang harus dilaksanakan oleh petugas Jembatan Timbang Singosari. Dari 7 butir pernyataan diatas dapat dianalisis sebagai berikut, bahwa dari 20 petugas di Jembatan Timbang Singosari,

8 orang sudah berperan secara pro aktif mencegah dan memberantas KKN serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan suap-menyuap dengan sopir angkutan barang pada saat proses penimbangan barang.

Delapan orang ini sudah secara pro aktif menolak dan memberitahukan secara persuasif tentang adanya Pakta Integritas dan memberitahukan kepada para stakeholder jembatan timbang bahwa jembatan timbang merupakan etalase pelayanan publik yang harus bebas dari praktek-praktek korupsi.

Namun sayangnya dalam observasi yang dilakukan peneliti secara diam-diam dan rahasia, masih ada 6 orang yang belum bisa berperan secara aktif mencegah praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di jembatan timbang. Umumnya mereka masih berharap mau menerima uang suap atas kelebihan muatan barang dari para sopir dengan besaran uang suap yang bervariasi, sementara 6 orang lainnya pasif.

Dalam prakteknya setelah ditandatanganinya Pakta Integritas semua petugas Jembatan Timbang Singosari yang terdiri dari 20 petugas, mereka tidak pernah meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alasannya mereka takut terkena sangsi jika ketahuan melanggar Pakta Integritas yang telah mereka tanda tangani. Dan mereka sekarang rata-rata (14 orang) bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Serta sudah mampu menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas (20 orang). Dan juga mereka sudah mampu memberi contoh (16 orang) dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada sesama karyawan dan pegawai di lingkungan kerja secara konsisten. Namun rata-rata mereka belum berani (10 orang) atau ewuh pekewuh menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur serta masih menjaga kerahasiaan atas pelanggaran Pakta Integritas yang dilakukan oleh rekannya. Namun jika mereka melanggar Pakta Integritas mereka siap menghadapi konsekwensinya.

Tabel 3. Matriks Pakta Integritas Untuk Petugas Jembatan Timbang Singosari

No	Pernyataan	Tidak	Pasif	Ya
1	Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela	6	6	8
2	Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0	0	20
3	Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas	3	3	14
4	Menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam pelaksanaan tugas	0	0	20
5	Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada sesama karyawan dan pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten	2	2	16
6	Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya	10	10	0
7	Bila kami melanggar hal-hal tersebut di atas kami siap menghadapi konsekwensinya	0	0	20

Sumber: Diolah dari Data Primer, Malang 2014

C. Strategi Pemberantasan Korupsi di Jembatan Timbang

Pada awalnya perubahan praktek-praktek pungli di jembatan timbang banyak mengalami kendala dan protes, namun bisa diminimalisir sampai akhirnya hilang dan tercapai tujuan bersama yaitu mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dan bebas korupsi. Komitmen terhadap peningkatan kinerja jembatan timbang antara lain dilakukan dengan strategi :

1. Penandatanganan Pakta Integritas oleh petugas jembatan timbang (Desember 2010);
2. Peningkatan koordinasi dengan POLRI melalui penandatanganan MoU antara Gubernur dengan KAPOLDA JATIM No.120.1/015/012/2011 dan KB/05/III/2011 tentang peningkatan kesadaran tertib berlalu lintas dalam rangka peng-angkutan barang di jalan dan jembatan timbang di Jawa Timur;
3. Sebagai obyek evaluasi penilaian pelayanan publik sektor perhubungan di Jawa Timur oleh KPK;
4. Pemberian bantuan transport kepada petugas (jembatan timbang dan Polri) melalui dana APBD;
5. Proses MoU dengan BPK, terkait dengan pengawasan dan pelaporan

6. Proses *review* Perda Kelebihan Muatan (Perda 7/2002).

Dengan sistem *computerized* semua data secara otomatis masuk dan ditampilkan pada layar, sehingga pengemudi dapat melihat langsung apakah muatannya berlebih atau tidak. Selain itu data yang masuk pada semua jembatan timbang di Jatim juga rekaman CCTV pada masing-masing jembatan timbang secara otomatis langsung terkoneksi dan tersimpan dengan baik di pusat data transportasi (JTCC) yang berada di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jatim.

JTCC diresmikan pada 27 oktober 2011 dengan tujuan untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan masyarakat akan jasa sehingga tercipta pelayanan yang tertib, teratur, tanggap dan bertanggung jawab terhadap keselamatan jasa perhubungan, serta dengan mengedepankan sistem teknologi informasi dapat memacu pola kerja yang gesit, transparan, mudah diakses dan dapat dipercaya.

Dalam hal pengawasan jembatan timbang selain pemantauan rutin dari JTCC, Dishub Jatim juga membuat tim khusus untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak). Selain oleh tim khusus Dishub, sidak juga dilakukan oleh tim khusus Gubernur.

Adanya *reward* dan *punishment* yang jelas dan konsisten juga berpengaruh terhadap pelaksanaan zona integritas. Kadishub mengatakan bahwa pegawai jembatan timbang melalui dana APBD diberikan penghasilan tambahan yang terdiri dari honor lembur (2 shift, pagi 3 jam, malam 4 jam) dan jaminan makan untuk petugas jembatan timbang dan Polri.

Hal lain dalam implementasi WBK di jembatan timbang adalah pengangkatan tenaga honorer swadana menjadi tenaga honorer daerah, mengikat sikap dan perilaku petugas jembatan timbang dengan menerapkan kode etik dan sosialisasi kepada pengusaha angkutan barang tentang penerapan zona integritas menuju WBK di jembatan timbang. Lebih lanjut lagi Kadishub menuturkan bahwa ke depannya di jembatan timbang yang memiliki area cukup luas akan diadakan pengembangan kawasan untuk *rest area* sehingga masyarakat bisa menikmati jembatan timbang sebagai area *public service* yang baik.

KESIMPULAN

Sebelum adanya Pakta Integritas praktek-praktek pungli di Jembatan Timbang Singosari marak terjadi. Hal ini disebabkan karena praktek-praktek tersebut merupakan kebiasaan lama yang sudah menjadi tradisi dan budaya. Dan setelah diterapkan Pakta Integritas dilingkungan petugas di Jembatan Timbang Singosari praktek-praktek pungli mengalami penurunan secara signifikan meskipun belum hilang sama sekali. Pakta Integritas tidak berpengaruh secara langsung terhadap pemilik kendaraan, pemilik barang, dan sopir angkutan barang. Hal ini disebabkan karena Pakta Integritas tidak berpengaruh secara langsung kepada mereka. Bahkan dengan adanya Pakta Integritas pemilik barang bisa mengalami kerugian karena tidak bisa memuat barang secara berlebihan, apalagi jika muatannya melebihi ketentuan justru harus membayar kompensasi kelebihan yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan klasifikasinya.

Pakta Integritas berpengaruh secara signifikan kepada para pegawai jembatan timbang dari semua tingkatan. Karena jembatan timbang telah menerapkan sistem *computerized* dimana kegiatan di seluruh jembatan timbang di Jawa Timur bisa dikontrol secara terpusat di Kantor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur. Sehingga kinerja para petugas jembatan timbang pun menjadi meningkat, hal ini ditunjukkan dengan semakin takutnya petugas jembatan

timbang menerima uang sogokan dari para sopir. Begitu juga produktivitas petugas di Jembatan Timbang Singosari menjadi meningkat yang ditunjukkan dengan pendapatan kompensasi kelebihan muatan yang melebihi target.

SARAN

Untuk mengoptimalkan kinerja para petugas sebagai unsur personal pelaksana yang bekerja di jembatan timbang dan juga jembatan timbang sebagai sebuah organisasi dimana peran mereka tidak bisa dilepaskan dari pihak-pihak terkait seperti pemilik kendaraan, pemilik barang, dan sopir, maka kepada 3 (tiga) stakeholder ini perlu diberi pemahaman yang benar dan jelas tentang fungsi jembatan timbang sebagai zona integritas bebas korupsi sebagai etalase publik harus bersih dari segala bentuk-bentuk penyuapan atau pungli.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit RajaGrafindo Persada, Edisi Pertama, Jakarta.
- Danil, Elwil. 2014. *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, Maret 2014, Jakarta.
- Emzir. 2010. Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Rajawali Pers, Cetakan ke-1, Jakarta.
- Moehariono. 2009. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Ciawi-Bogor.
- Prastowo, Andi. 2011. Memahami Metode-Metode Penelitian- Suatu Tinjauan Teoritis & Praksis. Penerbit Ar-Ruzz Media, Cetakan - I, Jogjakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012;
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1493/AJ108/DRJD/2013 Tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

<http://mutiara-fisip11.web.unair.ac.id>.

<http://freezcha.wordpress.com/2011/04/14/pakta-integritas/>.